

ANALISIS EFISIENSI BIAYA DAN HASIL (*OUTCOME*) DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)

(Studi Kasus: Pembangunan Konstruksi *Fly over* Jombor, Jalan Titik 0 Km dan Perpustakaan Grahatama)

Laeli Nur Khanifah, Achmad Nurmandi

laelinurkhanifah@gmail.com, nurmandi_achmad@gmail.com

Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi yang layak memiliki infrastruktur terkait dengan ikon kota pendidikan dan wisata sehingga pemerintah DIY perlu membangun konstruksi seperti *Flyover* Jombor, Jalan Titik Nol km dan Perpustakaan Grahatama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas belanja dan hasil (*outcome*) dari konstruksi *Flyover* Jombor, Jalan Titik 0 km serta Perpustakaan Grahatama di DIY. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis efisiensi biaya dan hasil (*outcome*) bagi publik pada pembangunan konstruksi *flyover* Jombor, Titik 0 Km dan Perpustakaan Grahatama berdasarkan data primer berupa wawancara dan data sekunder meliputi kajian literatur, berita tentang proyek konstruksi di DIY.

Hasil (*outcome*) pada konstruksi *Fly Over* Jombor adalah mengurangi tingkat dan biaya kemacetan lalu lintas, mengurangi tingkat polusi dan biaya polusi udara, terciptanya jarak tempuh yang efektif, meningkatnya aksesibilitas jalan, meningkatkan pendapatan UMKM serta memiliki efisiensi biaya antara biaya target awal dan biaya penyelesaian sebesar Rp.118.423.234.000 serta ketepatan waktu pembangunan di tahun 2014. Pada konstruksi Titik 0 Km adalah mampu mengurangi tingkat dan biaya kemacetan, angka kecelakaan dan meningkatnya kelayakan sanitasi, semua pengendara dapat menggunakan, meningkatkan pendapatan UMKM serta memiliki efisiensi biaya berupa lebihnya biaya antara biaya target awal sebesar Rp. 13.973.633.403 dengan biaya operasional sebesar Rp. 4.909.797.543 mencapai penyelesaiannya pada tahun yang sama yakni 2015. Pada konstruksi Perpustakaan Grahatama adalah menambah jumlah khasanah arsip, peningkatan pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi, meningkatnya jumlah pengunjung, mewujudkan masyarakat berbudaya dan meningkatkan pendapatan UMKM, namun tidak memiliki efisiensi biaya yakni berupa pembengkakan biaya antara biaya target awal sebesar Rp. 56.522.730.161 dengan biaya operasional sebesar Rp.129.643.639.009 serta tidak mencapai penyelesaian pembangunan dari target yang ditentukan yakni tahun 2012 namun selesai pada tahun 2015.

Pembangunan konstruksi *Fly Over* Jombor dan titik 0 km mencapai keberhasilan konstruksi yakni terdapat efisiensi biaya dan hasil (*outcome*) sedangkan konstruksi Perpustakaan Grahatama belum mencapai keberhasilan konstruksi karena tidak tercipta efisiensi biaya dan hanya mencapai hasil (*outcome*) bagi publik.

Kata Kunci : *Cost Benefif Analisis, Public Value Management, Konstruksi Fly over Jombor, Konstruksi Jalan Titik 0 Km, Konstruksi Perpustakaan Grahatama*

Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah sebagai bentuk pengambilan kebijakan. Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah untuk menciptakan kemajuan dibidang sosial dan ekonomi secara berkesinambungan, tanpa mengabaikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan konstruksi menjadi agenda publik yang penting dan strategis

jika melihat perkembangan yang terjadi secara cepat dalam konteks globalisasi dan liberalisasi, kemiskinan dan kesenjangan, demokratisasi dan otonomi daerah, serta kerusakan dan bencana alam. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyelenggarakan pembangunan konstruksi merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keberhasilan suatu proyek konstruksi akan susah dicapai apabila tidak ada kesinambungan antara perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan karena dalam melakukan kegiatan konstruksi semuanya saling berkaitan satu sama lain. Apabila dalam suatu proyek konstruksi tidak ada kerja sama kelompok maka akan terjadi kegagalan proyek konstruksi yang dapat menyebabkan rusaknya bangunan proyek konstruksi selama masa pembangunan.

DIY sebagai kota yang memiliki icon sebagai kota wisata, budaya dan pendidikan tentunya wajib memiliki infrastruktur yang baik dan memadai, namun pada kenyataannya banyak infrastruktur yang dibuat oleh pemerintah tidak difungsikan dengan baik seperti berita yang dimuat oleh jogja.tribunnews.com menyebutkan bahwa pada tahun 2012 ada 9 (sembilan) proyek besar yang mangkrak di DIY seperti XT Square, Taman Kuliner Concat, Sub Terminal Agribisnis, Pasar Seni Gabusan, Kulonprogo Fish Centre, Pasar Seni Sentolo, Rest Area Temon, Rest Area dan Tahura Bunder dan GSG Siyono. Selain proyek-proyek tersebut, pemerintah DIY juga membangun konstruksi seperti Fly over Jombor, Titik 0 Km dan Perpustakaan Grahutama.

DIY sebagai kota pendidikan dan kota wisata tentunya juga akan meningkatkan jumlah kendaraan bermotor. Dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di DIY mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Salah satu titik kemacetan di DIY yaitu di daerah Jombor. Untuk mengatasi kemacetan tersebut pemerintah DIY membangun *Fly over* Jombor. Namun pada tahun 2013 saat Dinas Pekerjaan Umum mengadakan koordinasi dengan PT Adhi Karya dalam program rekonstruksi, proyek atau pembangunan konstruksi *fly over* Jombor diketahui mengalami keruntuhan pada sisi badan jalan sebelah kanan dimana fasad atau struktur penyangga belum sepenuhnya mengalami padatan material sehingga fasad tersebut jatuh pada jalan aspal di bagian bawah. Hal ini berarti pembangunan konstruksi *flyover* Jombor belum sepenuhnya memenuhi konsep atau nilai yang dibutuhkan publik sebagai konstruksi yang multi dimensi. Peneliti memiliki asumsi bahwa peristiwa tersebut terkait erat dengan pengaturan dalam penganggaran biaya berupa efisiensi biaya perencanaan dan realisasi pekerjaan konstruksi.

Selanjutnya berkaitan dengan ikon DIY sebagai kota wisata, proyek pembangunan jalan menjadi prioritas pemerintah dalam rangka mendukung percepatan pembangunan perekonomian daerah atau kawasan. Pembangunan jalan yang dilakukan oleh pemerintah DIY salah satunya dengan cara merevitalisasi Jalan Titik 0 Km, dalam pembangunan tersebut peneliti menemukan bahwa dengan mengganti lapisan aspal dengan batu andesit tersebut berdampak pada kecelakaan transportasi utama yang menjadi transportasi ciri khas di kawasan titik 0 km yakni andong atau kereta kuda dimana banyak ditemukan beberapa kuda yang terjatuh karena terpeleset pada saat melewati kawasan titik 0 km dimana hal ini dapat membahayakan penumpang. Hal ini menjadi perhatian masyarakat atau publik baik masyarakat Yogyakarta maupun kalangan wisatawan terkait dengan desain titik 0 km yang mungkin belum dipertimbangkan secara matang sebelum pelaksanaan pembangunan sehingga kawasan tersebut belum sepenuhnya memiliki manfaat bagi publik.

Selanjutnya sebagai kota yang memiliki ikon sebagai kota pendidikan, perpustakaan merupakan sesuatu yang wajib disediakan oleh pemerintah DIY sebagai magnetik untuk menarik pelajar mahasiswa yang datang dari berbagai penjuru nusantara untuk menempuh pendidikan di DIY. Perpustakaan Grahutama merupakan salah satu proyek yang pernah mangkrak atau terhenti pembangunannya di DIY, namun pemerintah melakukan upaya agar proyek besar tersebut dapat diselesaikan mengingat pentingnya fasilitas perpustakaan bagi

masyarakat. Selain itu, hal ini juga dilakukan oleh pemerintah untuk mengangkat *image* DIY sebagai kota Pendidikan di mata dunia. Proyek pembangunan perpustakaan Grahatama dimulai sejak tahun 2010 dan ditargetkan selesai pada tahun 2012, namun pada kenyataannya di tahun 2012 proyek ini belum selesai dibangun. Berdasarkan hal tersebut, peneliti berasumsi bahwa proyek konstruksi Perpustakaan Grahatama yang sempat mengalami pemberhentian masa pengerjaan dari akhir tahun 2012 hingga pertengahan tahun 2013 terkait erat dengan permasalahan pada sistem penganggaran, perencanaan hingga realisasi dimana biaya tersebut berhubungan dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama pada perusahaan pengembang yang mengerjakan proyek tersebut.

Ketiga proyek tersebut menjadi penting untuk diteliti terkait dengan permasalahan sistem penganggaran biaya perencanaan dan realisasi yang telah diasumsikan sebelumnya oleh peneliti. Hal ini juga sejalan dengan ikon DIY sebagai kota pendidikan dan kota wisata yang memiliki visi pembangunan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu terwujudnya pembangunan regional sebagai wahana menuju pada kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2020 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan daerah Tujuan Wisata terkemuka, dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera lahir batin didukung oleh nilai-nilai kejujuran dan pemerintah yang bersih dalam pemerintahan yang baik dengan mengembangkan ketahanan sosial budaya dan sumber daya berkelanjutan.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah hasil (outcome) dan efisiensi biaya dari pembangunan konstruksi *Flyover* Jombor, Titik 0 Km dan Perpustakaan Grahatama yang dibangun oleh pemerintah DIY?

Kerangka teori

Cost and Benefit Analysis (Analisis Biaya dan Manfaat)

Analisis *Cost and Benefit Analysis* (CBA) adalah alat yang digunakan untuk menentukan peringkat proyek atau untuk memilih pilihan yang paling tepat. Peringkat atau keputusan tersebut didasarkan pada biaya ekonomi dan manfaat yang diharapkan (Department of Environmental Affairs and Tourism: 2006)

Sedangkan Prasetya (2012)⁹ analisis biaya dan manfaat banyak digunakan untuk mengevaluasi penggunaan sumber-sumber ekonomi agar sumber yang langka tersebut dapat digunakan secara efisien dan oleh karena itu merupakan metode yang sangat penting untuk dipahami. Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Schniederjans et al dalam Christian (2013)¹⁰ *Cost-Benefit Analysis* adalah suatu teknik untuk menganalisis biaya dan manfaat yang melibatkan estimasi dan mengevaluasi dari manfaat yang terkait dengan alternatif tindakan yang akan dilakukan.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa analisa biaya manfaat adalah suatu cara untuk menghitung (dalam besaran nilai uang) sejauh mana biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mewujudkan suatu proyek tertentu memberikan hasil manfaat, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk dipilih atau tidak dalam suatu pengambilan keputusan. Ciri Khusus *Cost-Benefit Analysis* (CBA) adalah mengukur semua biaya dan manfaat untuk masyarakat yang kemungkinan dihasilkan dari program public, tradisional melambangkan rasionalitas ekonomi, karena kriteria sebagian besar ditemukan dengan penggunaan efisiensi secara global, menggunakan pasar swasta sebagai titik tolak di dalam memberikan rekomendasi program public dan digunakan untuk mengukur pendistribusian kembali manfaat.

Komponen yang diperlukan untuk menganalisis biaya/efektivitas yaitu komponen biaya dan komponen Efektivitas. Biaya yang berhubungan dengan pembangunan konstruksi dapat diklasifikasikan ke dalam 4 katagori utama yaitu biaya persiapan, biaya investasi atau modal, biaya operasional dan biaya pembaharuan atau penggantian. Efisiensi pembiayaan merupakan aktifitas yang berkaitan dengan pengendalian biaya yang berarti bahwa biaya yang dikeluarkan atau biaya target meliputi biaya pengadaan dan persiapan untuk direalisasikan dalam bentuk

biaya proyek serta biaya operasi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aktiva tersebut (Handoko, 2015)¹¹. Sedangkan menurut (Blocher, 2007)¹² efisiensi merupakan kemampuan perusahaan untuk tidak membuang sumber pembiayaan yang melebihi jumlah diperlukan.

Berdasarkan pengertian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa efisiensi biaya merupakan suatu tolak ukur atau indikator keberhasilan dari suatu aktor pembuat atau perencana pembiayaan dimana dalam menjalankan usaha atau pengerjaan menimbulkan besaran biaya operasional yang sesuai atau kurang dari biaya perencanaan semula.

Merujuk pada pernyataan di atas, efisiensi biaya merupakan suatu tolak ukur atau indikator keberhasilan dari pembuat rencana biaya awal yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum ESDM DIY serta Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah untuk direalisasikan dalam biaya operasional pada pihak pelaksana proyek konstruksi *Fly over* Jombor, titik 0 km dan Perpustakaan Grahatama sehingga menghasilkan besaran biaya yang sesuai dengan biaya awal atau biaya persiapan dengan besaran biaya operasional atau biaya realisasi. Di satu sisi, biaya akan lebih efisien apabila terdapat selisih lebih antara besaran biaya yang sesuai dengan biaya awal atau biaya persiapan dengan besaran biaya operasional atau biaya realisasi.

Public Value Management (Nilai Manajemen Publik)

Konsep nilai publik dapat dijelaskan sebagai struktur yang multidimensi, sebagai refleksi dari ekspresi kolektif, yang diciptakan tidak hanya melalui hasil, tetapi juga melalui proses yang dapat menghasilkan kepercayaan dan kesetaraan. Nilai publik adalah tantangan yang signifikan bagi administrasi publik, dan para akademisi yang akan membuat progres signifikan untuk mengeksplor maksud, penyelesaian dan tantangan tersebut (Bozeman, *et al* dalam Yang (2016)¹³. Selain itu Moore dalam *Todoruț dan Tselentis (2015)*¹⁴ mendefinisikan “nilai publik” sebagai kerangka kerja yang membantu kita terhubung dengan apa yang kita percaya adalah sesuatu yang berharga dan membutuhkan sumber daya publik bersama-sama dengan cara-cara untuk meningkatkan pemahaman tentang “nilai publik”.

Di dalam paradigma nilai publik (*public value*) lebih mudah diterima bahwa aktivitas pemerintah saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain dan dengan demikian mungkin akan memerlukan lebih banyak upaya untuk kolaborasi dalam mengejar nilai-nilai publik O’Flynn (2007)¹⁵.

Dari semua hal itu, di dalam model *public value* (nilai publik), politik tidak hanya dibatasi pada beberapa ruang tertentu, dan karakteristik ini membuat perbedaan yang cukup besar dari dua paradigma yang lain. Paradigma tradisional dan paradigma management baru (*New Public Management*) berusaha untuk membatasi peran politik kedalam sistem management dan keputusan akhir. Aldridge dan Stoker (2002) mengidentifikasi lima elemen dari etos paradigma *New Public Management* (NPM) yang seharusnya diadopsi oleh semua penyedia pelayanan publik yaitu budaya kinerja, komitmen akuntabilitas, kapasitas untuk mendukung akses secara menyeluruh, pertanggungjawaban praktek kerja dan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, menurut Moore dalam Yang (2016) menjelaskan bahwa nilai-nilai publik mengacu pada hasil yang diinginkan berkaitan dengan kualitas hidup individu dan kolektif bagi warga negara yaitu:

- a. Hak manfaat dan hak istimewa untuk warga Negara yang seharusnya (tidak seharusnya) dimiliki,
- b. Kewajiban warga Negara untuk bermasyarakat, bernegara satu sama lain dan
- c. Prinsip-prinsip yang harus di patuhi dalam membuat kebijakan pemerintah.

Selain itu Al-mawardi (2014) juga menyebutkan unsur-unsur negara dalam Islam adalah

- a. kesejahteraan masyarakat
sebuah kondisi yang memperlihatkan tentang kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin: 2012).
- b. keadilan
menjadikan dua benda itu sama dan juga meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adapun prinsip keadilan menurut Rama dan Makhiani (2014) apabila dikaitkan dengan demokrasi Islam, dilihat dari fungsi kekuasaan negara yaitu kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan adil, jujur dan bijaksana, rakyat harus dapat memperoleh hak-haknya secara adil tanpa suatu diskriminasi, kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya, kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
- c. Keamanan yang merata
Keamanan dalam hal ini adalah terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Berdasarkan beberapa penjabaran di atas, nilai-nilai publik yang tercantum dalam *Public Value Management* dan *Islamic Public Value* memiliki persamaan dalam tujuan kebijakan bagi publik dimana nilai hak manfaat dan istimewa bagi warga negara yang seharusnya atau tidak seharusnya dimiliki bertujuan dalam memperoleh keamanan yang merata bagi masyarakat dalam menggunakan hasil pembangunan yang diselenggarakan. Sedangkan nilai kewajiban warga negara untuk bermasyarakat, bernegara satu sama lain merupakan kebijakan instansi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat terkait dengan hasil pembangunan. Di satu sisi, nilai prinsip-prinsip yang harus di patuhi oleh suatu instansi dalam membuat kebijakan bertujuan untuk menciptakan keadilan yang menyeluruh bagi masyarakat sehubungan dengan pembangunan proyek yang diselenggarakan sehingga unsur-unsur nilai tersebut merupakan nilai kombinasi (*combination value*) publik yakni manfaat publik, kesejahteraan dan keadilan dalam pembangunan proyek konstruksi.

Pembangunan proyek konstruksi memiliki sasaran yang dituju. Sasaran adalah tujuan yang spesifik dimana semua kegiatan diarahkan dan diusahakan untuk mencapainya. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Setiawan, dan Ariadi (2012)²⁴ bahwa keberhasilan proyek ditentukan oleh beberapa indikator yakni waktu penyelesaian \leq waktu rencana, biaya penyelesaian \leq biaya rencana dan mutu penyelesaian \geq mutu rencana

Pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan konstruksi terkait dengan kebutuhan publik akan transportasi juga harus memperhatikan prinsip penurunan kemacetan yang berhubungan dengan penurunan biaya kemacetan sebagaimana yang dinyatakan oleh (Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997) bahwa kemacetan merupakan suatu kondisi dimana arus lalu lintas yang lewat pada ruas jalan setelah melalui proses peninjauan terdapat kelebihan kapasitas pada rencana jalan sehingga mengakibatkan kecepatan bebas ruas jalan mendekati atau melebihi 0 km/jam sehingga menyebabkan terjadinya antrian dengan nilai derajat kejenuhan lebih dari 0,5. Apabila pemerintah kurang memperhatikan hal tersebut, maka akan menimbulkan kenaikan biaya kemacetan sebagaimana yang dinyatakan oleh Hayati, Wicaksono, dan Sutikno (2013) bahwa biaya kemacetan merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan parameter yakni kecepatan eksisting dan ideal, biaya operasional kendaraan, nilai dan waktu perjalanan dan antrian kendaraan.

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah DIY dalam menyelenggarakan pembangunan konstruksi *fly over* Jombor dan titik 0 km untuk kepentingan publik seharusnya mengacu pada penurunan tingkat polusi dan biaya polusinya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pengguna hasil konstruksi tersebut terkait dengan kualitas kesehatannya. Di satu

sisi, pembangunan konstruksi *flyover* Jombor dan titik 0 km yang diselenggarakan oleh pemerintah DIY juga tidak terlepas dari wewenang dalam meningkatkan kelayakan sanitasi sebagai pendukung dari kelangsungan pembangunan konstruksi tersebut dimana menurut World Health Organization (WHO) sanitasi merupakan suatu usaha oleh badan usaha dalam mengawasi faktor lingkungan fisik yang mempengaruhi kehidupan manusia yang berkaitan dengan efek dari kerusakan perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup (Yulia,2006).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah DIY dalam rangka melaksanakan pembangunan *Fly over* Jombor, titik 0 km dan Perpustakaan Grahatama untuk memenuhi manfaat publik harus memperhatikan beberapa hal seperti prinsip akuntabilitas, konstruksi serta pengadaan barang dan jasa sehingga hasil dari pembangunan konstruksi tersebut benar-benar dirasakan oleh publik dalam menumbuhkan kesejahteraan dan keadilan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis studi kasus untuk meneliti efisiensi biaya dan hasil (*outcome*) pada pembangunan konstruksi *fly over* Jombor, titik 0 km dan Perpustakaan Grahatama dimana peneliti menganalisa pengaruh dari efisiensi biaya dari ketiga konstruksi tersebut terhadap dampak dari realisasi pembangunan konstruksi bagi publik sehingga objek penelitian ini berupa studi kasus (*case study*).

Menurut Sukmadinata dalam Bachri (2010) menyatakan bahwa penelitian kualitatif (*qualitative research*) merupakan suatu penelitian yang mempunyai tujuan dalam mendeskripsikan atau menggambarkan kemudian menganalisis suatu fenomena, saktifitas sosial, sikap, kepercayaan persepsi, serta pemikiran individu maupun kelompok. Menurut Arikunto (2010) penelitian kasus (*case study*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara terus menerus dan memperdalam sebuah obyek dari suatu organisasi, lembaga serta fenomena tertentu.

Penelitian ini mengambil lokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkait dengan beberapa permasalahan yang ditemui oleh peneliti seperti pada pembangunan konstruksi *fly over* Jombor yang belum sepenuhnya memenuhi konsep atau nilai yang dibutuhkan publik sebagai konstruksi. Sedangkan pada pembangunan konstruksi titik 0 km, peneliti menemukan fenomena tentang penggantian lapisan aspal dengan batu andesit yang berdampak pada kecelakaan transportasi kereta kuda. Sedangkan lokasi penelitian berikutnya adalah Perpustakaan Grahatama dimana peneliti menemukan bahwa proyek konstruksi Perpustakaan Grahatama sempat mengalami pemberhentian masa pengerjaan dari akhir tahun 2012 hingga pertengahan tahun 2013 terkait erat dengan permasalahan pada sistem penganggaran, perencanaan hingga realisasi biaya yang berhubungan dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

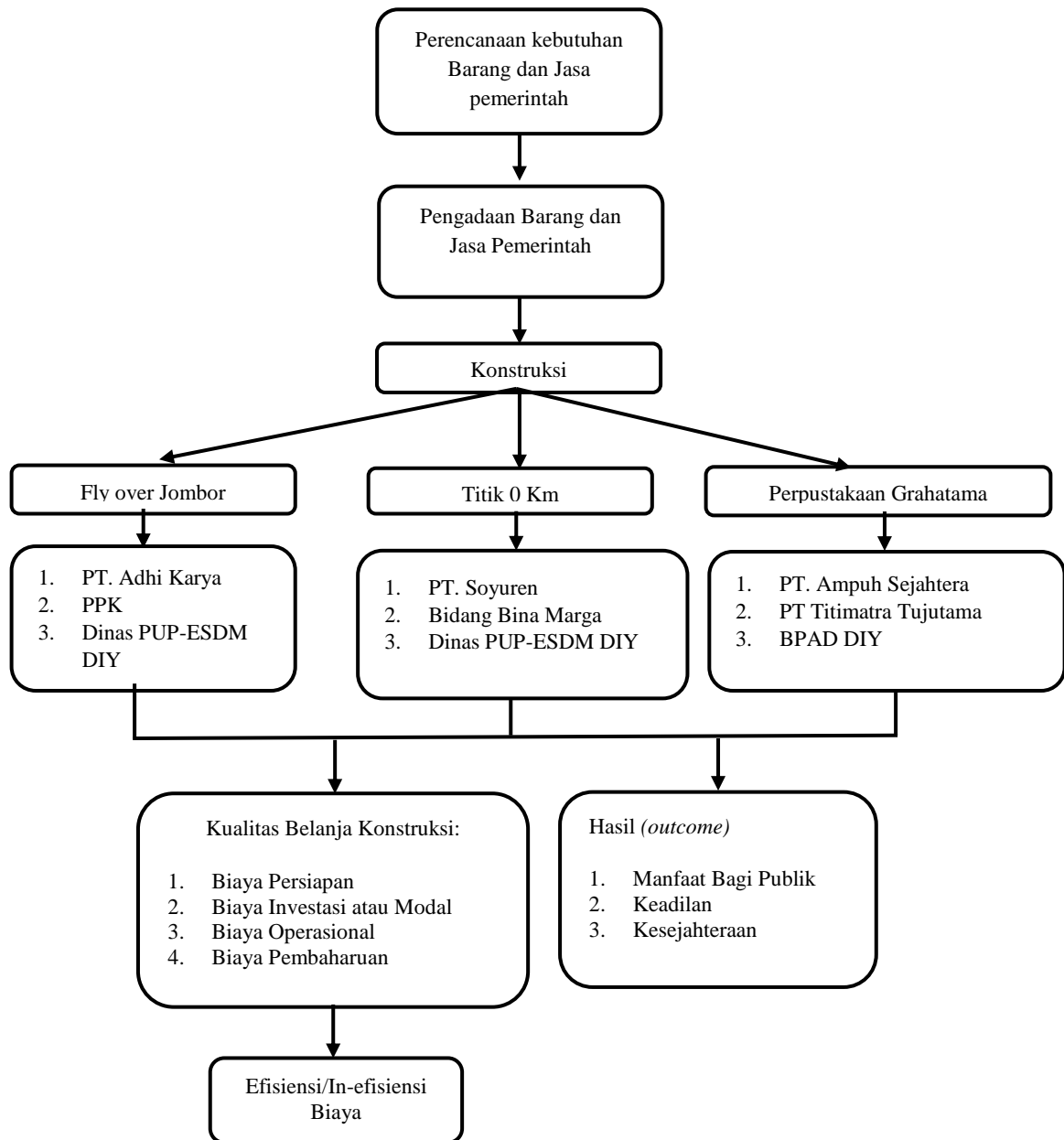
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan teknik analisa data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis model interaktif (*Interactive Model of Analysis*) yang dikembangkan oleh Miles dan Haberman (1992)³² dalam Salim dan Carolina (2006).

Hasil (*Outcome*) Pekerjaan Konstruksi

Hasil (*outcome*) adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. *Outcome* juga berkaitan dengan tujuan atau target yang hendak dicapai dari sebuah program yang telah dilaksanakan (Anggraini; 2013). Program pembangunan konstruksi *flyover* Jombor, Titik 0 Km dan Perpustakaan Grahatama oleh pemerintah DIY merupakan salah satu bagian dari proses pengadaan barang dan jasa dimana proses tersebut dilakukan melalui sistem elektronik (*e-procurement*) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan

pelaporan untuk mengukur efisiensi biaya dari setiap konstruksi sehingga menghasilkan manfaat bagi publik (*outcome*) sebagaimana yang tertera pada bagan di bawah ini:

Gambar 1.1 Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah



1. Konstruksi *Fly over Jombor*

Fly over merupakan model jembatan layang yang dibangun diatas jalan. Pemerintah DIY membangun jembatan layang di daerah Jombor yang sering dikenal oleh masyarakat sebagai *Fly over Jombor*. Tujuan dari pembangunan *fly over* ini adalah untuk mengurangi masalah kemacetan di simpang 4 (empat) Jombor yang memiliki kepadatan lalu lintas tinggi terutama pada jam puncak yaitu waktu berangkat dan pulang sekolah maupun kerja. Semakin banyaknya jumlah kendaraan yang ada di jalan maka akan semakin sempit ruang gerak kendaraan untuk melintasi jalan. Hal ini mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan raya.

Masalah kemacetan lalu lintas seringkali terjadi pada kawasan yang mempunyai intensitas kegiatan dan penggunaan lahan yang tinggi. Selain itu, kemacetan lalu lintas terjadi karena volume lalu lintas tinggi yang disebabkan bercampurnya lalu lintas

menerus (*through traffic*), lalu lintas regional dan lokal. Apabila sifat kemacetan lalu lintas tersebut merupakan suatu kejadian yang rutin, akibatnya bukan saja akan mempengaruhi inefisiensi penggunaan sumber daya, tetapi juga dapat mengganggu kegiatan di lingkungan yang ada. Selain itu, berdampak luas juga terhadap kelancaran kegiatan sosial dan ekonomi. Kemacetan adalah turunya tingkat kelancaran arus lalu lintas pada jalan yang ada, dan sangat mempengaruhi para pelaku perjalanan, baik yang menggunakan angkutan umum maupun angkutan pribadi, hal ini berdampak pada ketidaknyamanan serta menambah waktu perjalanan bagi pelaku perjalanan (Margareth, dkk; 2015).

Pembangunan konstruksi *flyover* Jombor memiliki hasil (*outcome*) yaitu manfaat bagi publik dengan berkurangnya tingkat kemacetan lalu lintas. Hal ini juga terbukti dengan berkurangnya biaya kemacetan sebelum dan sesudah pembangunan konstruksi *fly over* Jombor yang terperinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Biaya Kemacetan Simpang Empat *Fly Over* Jombor Tahun 2010 dan 2015

Sumber: Laporan Lalu Lintas Dinas Perhubungan DIY Tahun 2016 data telah diolah

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan	Biaya kemacetan (km/jam)		Biaya Total Kemacetan	
			2010	2015	2010	2015
1	Mobil Pribadi	200	Rp 2.900	Rp 1.700	Rp 580.000	Rp 340.000
2	Bus/Truk	200	Rp 7.264	Rp 6.064	Rp 1.452.800	Rp 1.212.000
3	Motor	400	Rp 1.800	Rp 600	RP 720.000	Rp 240.000
TOTAL BIAYA KEMACETAN					Rp 2.752.800	Rp 1.792.000

Berdasarkan tabel di atas diperoleh data bahwa biaya total kemacetan di area *Flyover* Jombor mengalami penurunan angka yaitu pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 2.752.800 menjadi Rp 1.792.000 pada tahun 2015. Biaya total kemacetan tersebut dianalisa berdasarkan penghitungan jumlah total jenis kendaraan dikalikan dengan biaya kemacetan jenis kendaraan dalam km/jam di mana biaya tersebut bersumber dari data biaya kemacetan simpang empat *fly over* Jombor dari Dinas Perhubungan DIY.

Selanjutnya, pembangunan *fly over* jombor juga memiliki hasil (*outcome*) yaitu manfaat bagi publik dengan berkurangnya tingkat polusi udara. Hal ini juga diperkuat dengan data tentang biaya polusi udara sebelum dan sesudah pembangunan konstruksi *fly over* Jombor bahwa biaya total polusi udara di area *Fly over* Jombor mengalami penurunan angka yaitu pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 207.200 menjadi Rp. 42.600 pada tahun 2015. Biaya total polusi udara tersebut dianalisa berdasarkan penghitungan jumlah total jenis kendaraan dikalikan dengan biaya polusi udara dalam Rp/km di mana biaya tersebut bersumber dari data biaya polusi udara simpang empat *fly over* Jombor BPS (Jogja dalam Angka) tahun 2016. Hal ini berarti bahwa pembangunan *Fly over* Jombor yang memiliki tujuan untuk mengurai kemacetan sehingga memiliki dampak positif bagi publik yaitu berkurangnya tingkat polusi udara.

Tabel 1.2 Biaya Polusi Udara *Fly Over* Jombor Tahun 2010 dan 2015

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan	Biaya polusi udara (Rp/km)		Biaya Total Polusi udara	
			2010	2015	2010	2015
1	Mobil Pribadi	200	Rp 210	Rp 58	Rp 112.000	Rp 13.000
2	Bus/Truk	200	Rp 560	Rp 65	Rp 43.200	Rp 11.600
3	Motor	400	Rp 130	Rp 45	RP 52.000	Rp 18.000
TOTAL BIAYA POLUSI					Rp 207.200	Rp 42.600

Sumber: BPS (Jogja dalam Angka) Tahun 2016 data telah diolah

Selanjutnya, pembangunan konstruksi *Flyover* Jombor juga memiliki hasil (*outcome*) yaitu keefektifan jarak tempuh bagi masyarakat yang melewati *flyover* Jombor. Jarak tempuh merupakan seberapa jauh jarak lokasi yang akan dituju dan waktu yang dibutuhkan untuk menuju lokasi tersebut. Berdasarkan pengamatan dari tim survei Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka mengukur kecepatan lalu lintas dengan alat ukur berupa stop watch, meteran dan formulir survei serta pengukuran jumlah volume kendaraan dengan menggunakan Tally Counter, formulir survei serta meteran dengan jadwal survei dari pukul 06.30-12.30 WIB didapatkan hasil bahwa rata-rata kecepatan lalu lintas sebesar 2767,56 C yang berarti bahwa *fly over* Jombor mampu menampung jumlah volume dan arus lalu lintas dengan lancar.

Pembangunan konstruksi *fly over* Jombor juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar konstruksi (Muhammad, Pambudi dan Subarkah; 2015) seperti Renggangnya Interaksi Antar Warga, Kebisingan Suara dan Degradasi Lingkungan di Sekitar *Fly Over*.

Pembangunan konstruksi maupun fasilitas publik yang dibangun oleh pemerintah memiliki dampak bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu dampak dari pembangunan konstruksi oleh pemerintah adalah pada kesejahteraan masyarakat. Pembangunan konstruksi *fly over* Jombor memiliki hasil (*outcome*) yaitu kesejahteraan berupa kenaikan hasil UMKM masyarakat sekitar dengan diadakannya pembangunan konstruksi *fly over* Jombor. Selanjutnya, peningkatan pendapatan UMKM bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman tahun 2010 dan 2015 dalam rangka menilai laju pertumbuhan UMKM sebelum dan sesudah pembangunan konstruksi *Fly over* Jombor bahwa data dalam BPS Kabupaten Sleman tahun 2010 dinyatakan bahwa sebelum pembangunan *flyover* memiliki nilai UMKM sebesar Rp. 2.388.999 sedangkan setelah pembangunan *flyover* nilai UMKM bertambah menjadi Rp. 3.255.739 pada tahun 2015. Hal ini berarti bahwa pembangunan *fly over* Jombor memiliki dampak positif bagi laju pertumbuhan nilai UMKM sebesar Rp. 866.740 (0.7%) dalam jangka waktu 5 tahun.

Keadilan berkaitan dengan siapa saja yang diperbolehkan untuk mengakses dan menggunakan jalan raya yang dibangun oleh pemerintah guna pemenuhan kebutuhan masyarakat tanpa membeda-bedakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Lapangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bahwa pembangunan konstruksi *fly over* Jombor memiliki hasil (*outcome*) keadilan berupa meningkatnya aksesibilitas jalan yaitu pada jarak jauh atau jarak dekat berdasarkan kondisi prasarana yang dicapai dimana pada aksesibilitas jarak jauh dan dekat dikatakan sangat baik atau memiliki indeks aksesibilitas yang tinggi sebesar 1,00 dengan kategori sangat tinggi.

2. Konstruksi Titik 0 Km

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah yang menjadi tujuan destinasi wisata baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Malioboro merupakan salah satu tempat yang banyak sekali didatangi oleh wisatawan sehingga sering terjadi kemacetan di sekitar lokasi tersebut. Lokasi yang menjadi pusat perhatian bagi wisatawan adalah kawasan titik 0 km.

Titik 0 km merupakan pusat kota Yogyakarta di mana disekitar kawasan tersebut terdapat banyak bangunan-bangunan bersejarah yang sampai saat ini masih terawat dan masih digunakan. Titik 0 km juga menghubungkan area ekonomi, perdagangan, wisata, serta pendidikan. Kegiatan-kegiatan yang banyak dilakukan di Kawasan Titik 0 Km akan berdampak pada padatnya lalu lintas di kawasan tersebut yang mengakibatkan kemacetan. Untuk mengatasi masalah tersebut kemudian pemerintah DIY merevitalisasi titik nol Km yang bertujuan untuk kelancaran lalu lintas di kawasan tersebut.

Banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa manfaat dari pembangunan revitalisasi tersebut. Jika dilihat secara langsung jalan di perempatan titik 0 km tampak berbeda dengan jalan pada umumnya yang di lapisi dengan aspal, namun perempatan titik nol km pada bagian permukaanya dibangun menggunakan batu andesit yang bertujuan untuk memperlambat laju kendaraan dan kelancaran lalulintas.

Revitalisasi kawasan titik 0 km memiliki manfaat pada pengurangan tingkat kemacetan, hal ini juga didukung dengan data tentang biaya kemacetan sebelum dan sesudah pembangunan konstruksi titik 0 km bahwa biaya total kemacetan di area Titik 0 km mengalami penurunan angka yaitu pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 3.952.000 menjadi Rp. 3.492.800 pada tahun 2016. Biaya total kemacetan tersebut dianalisa berdasarkan penghitungan jumlah total jenis kendaraan dikalikan dengan biaya kemacetan jenis kendaraan dalam km/jam dimana biaya tersebut bersumber dari data biaya kemacetan simpang empat titik 0 km dari Dinas Perhubungan DIY seperti yang terperinci pada table di bawah ini.

Tabel 1.3 Biaya Kemacetan Simpang Empat Titik 0 Km Tahun 2014 dan 2016

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan	Biaya kemacetan (km/jam)		Biaya Total Kemacetan	
			2014	2016	2014	2016
1	Mobil Pribadi	200	Rp 4.400	Rp 3.900	Rp 880.000	Rp 780.000
2	Bus/Truk	200	Rp 8.764	Rp 8.164	Rp 1.752.800	Rp 1.632.800
3	Motor	400	Rp 3.300	Rp 2.700	RP 1.320.000	Rp 1.080.000
TOTAL BIAYA KEMACETAN					Rp 3.952.000	Rp 3.492.800

Sumber: Dinas Perhubungan DIY Tahun 2016

Permasalahan serius yang dihadapi oleh kota-kota besar seperti Yogyakarta salah satunya adalah masalah kecelakaan lalu lintas. Keadaan ini merupakan sebuah bukti dari berkembangnya teknologi modern yang terjadi di lingkungan masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun semakin meningkat baik roda dua maupun roda empat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keamanan lalu lintas yang semakin sering terjadi seperti kondisi jalan yang berakibat pada kecelakaan lalu lintas. Revitalisasi kawasan titik 0 km merupakan salah satu proyek pemerintah yang memiliki tujuan untuk mengurangi angka kecelakaan yang sering terjadi di simpang jalan tersebut.

Pembangunan konstruksi titik 0 km memiliki hasil (*outcome*) yaitu manfaat bagi publik dengan berkurangnya angka kecelakaan lalu lintas. Hal ini di perkuat berdasarkan buku laporan “Jogja Dalam Angka” Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta Tahun 2014 dan 2016 menunjukkan bahwa ada penurunan angka kecelakaan di wilayah Malioboro, dimana di tahun 2014 jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 673 jenis kecelakaan dan mengalami kerugian materi sebesar Rp. 672.766 sedangkan di tahun 2016 jumlah kecelakaan sebanyak 491 dan mengalami kerugian materi sebesar Rp. 582.200.

Tabel 1.4 Angka Kecelakaan Di Wilayan Malioboro Sebelum Dan Sesudah Revitalisasi Titik 0 Km Tahun 2014 Dan 2016

Jenis Kecelakaan	Tahun	
	2014	2016
Jumlah Kecelakaan	678	491
Kerugian Materi	672.766	582.200

Sumber: (BPS) Jogja Dalam Angka Tahun 2015 Data Telah Diolah

Hal ini menandakan bahwa dengan adanya revitalisasi Titik 0 Km dengan design yang melengkung pada bagian tengah dan memiliki lapisan yang terbuat dari batu andesit memiliki dampak pada pengurangan tingkat kecelakaan di kawasan titik 0 km.

Selanjutnya, revitalisasi titik 0 km memiliki hasil (*outcome*) dengan meningkatnya kelayakan sanitasi. Berdasarkan laporan akhir garis besar strategi manajemen limbah cair di Kota Yogyakarta tahun 2016, didapatkan data tentang biaya kelayakan sanitasi sebelum dan sesudah pembangunan konstruksi titik 0 km bahwa biaya manajemen limbah di 0 km mengalami peningkatan subsidi dari pemerintah kota Yogyakarta yakni pada tahun 2014 sebesar Rp.38.000.000 dan Rp. 1.000.000.000 di tahun 2016. Sedangkan biaya jaringan pembuangan limbah juga mengalami peningkatan yakni pada tahun 2014 sebesar Rp 312.000.000 dan Rp 352.000.000 pada tahun 2016. Hal ini berarti bahwa pemerintah kota Yogyakarta dalam membangun konstruksi Titik 0 km telah memenuhi unsur upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan masyarakat yaitu dengan menciptakan pemeliharaan sanitasi di sekitar kawasan Titik 0 km. Salah satu tolak ukur atau indikator dari layaknya sanitasi ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah sambungan saluran limbah, maka subsidi pemerintah dalam membiayai pelaksanaan peningkatan sambungan saluran limbah juga meningkat.

Tabel 1.5 Biaya Kelayakan sanitasi Kota Yogyakarta tahun 2014 dan 2016

No	Kategori	Biaya Manajemen Limbah	
		2014	2016
1	Jaringan Pembuangan Limbah	Rp 312.000.000	Rp 352.000.000
2	Subsidi Pemerintah	Rp.38.000.000	Rp. 1.000.000.000

Sumber: Laporan Akhir, Garis Besar Strategi Manajemen Limbah Cair di Kota Yogyakarta dan sekitarnya, tahun 2016, USAID data telah diolah

Pembangunan konstruksi Titik 0 km selain memberikan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar konstruksi menurut Lufityanti (2017), yaitu membuat lingkungan menjadi kurang bersih. Banyaknya sampah di beberapa lubang yang berbentuk kotak pada batu andesit di sekitar Titik 0 Kilometer sangat mengganggu warga dan wisatawan. Sampah tersebut merupakan sisa-sisa bungkus makanan dari pedagang. Kondisi ini membuat lingkungan sekitar 0 km menjadi kurang bersih dan dapat menimbulkan penyakit.

Revitalisasi kawasan titik 0 km merupakan program pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi DIY yang memiliki tujuan untuk memperindah kawasan tersebut karena banyak wisatawan yang tidak mengetahui ataupun menyadari keberadaan dari titik 0 km yang merupakan pusat Kota Yogyakarta. Pembangunan Revitalisasi kawasan Titik 0 km mampu menarik perhatian wisatawan, sehingga berdampak pada pendapatan UMKM dari masyarakat yang memiliki usaha di sekitar kawasan tersebut.

Peneliti dalam menganalisis hasil (*outcome*) dari pekerjaan konstruksi titik 0 km terkait dengan kesejahteraan yaitu dalam meningkatkan pendapatan UMKM menggunakan data pendukung atau sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta tahun 2014 dan 2016 dalam rangka menilai laju pertumbuhan UMKM sebelum dan sesudah pembangunan konstruksi titik 0 km bahwa data dalam BPS Kota Yogyakarta tahun 2014 dinyatakan bahwa sebelum pembangunan titik 0 km memiliki nilai UMKM sebesar Rp. 1.674.189 sedangkan setelah pembangunan titik 0 km nilai UMKM bertambah menjadi Rp. 1.783.819 pada tahun 2016. Hal ini berarti bahwa pembangunan titik 0 km memiliki dampak positif bagi laju pertumbuhan nilai UMKM sebesar Rp. 109.630 (0.9%) dalam jangka waktu 2 tahun.

Selanjutnya, Titik 0 km merupakan sebuah titik yang menjadi pedoman penentuan jarak antar daerah atau kota-kota lain dari luar Yogyakarta. Di kawasan tersebut semua jenis kendaraan dapat melintasi dan menggunkan jalan tersebut seperti andong, bus, sepeda motor, dan kendaraan lainnya kecuali Truk-truk dengan muatan besar karena akan menghambat lalu lintas.

3. Konstruksi Perpustakaan Grahatama

Perpustakaan merupakan sarana edukasi bagi masyarakat khususnya bagi pelajar dan mahasiswa. Berdasarkan pasal 1 UU No 43 Tahun 2007 menyebutkan bahwa perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka. Salah satu perpustakaan umum yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Grhatama Pustaka BPAD DIY yang beralamat di Jl. Raya Janti, Banguntapan Bantul.

Grhatama Pustaka diresmikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada tanggal 21 Desember 2015 di lahan seluas 2,4 hektar. Salah satu tujuan didirikannya Grhatama Pustaka adalah untuk memberikan alternatif area publik yang mengedepankan fungsi keilmuan, pendidikan dan wahana rekreatif. Pembangunan Grhatama Pustaka sangat kental dengan nuansa budaya Jawa dimana filosofi kesempurnaan hidup orang Jawa tercermin dalam desain arsitektur empat minaret yaitu Prakoso, Wulung, Wangi, dan Agung. Drajat tertinggi kesempurnaan hidup orang Jawa tersebut dapat diraih melalui perpustakaan yang menyimpan koleksi berbagai macam pengetahuan.

Arsip memiliki arti yang sangat penting bagi sebuah lembaga, dan hal itu menjadikan arsip harus diselamatkan karena informasi yang terekam dalam arsip banyak menyimpan berbagai informasi penting tentang memori kolektif bangsa atau lembaga yang dapat dijadikan sebagai bahan bukti pertanggungjawaban di masa kini atau mendatang. Arsip menjadi bukti otentik mengenai penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kelembagaan yang merupakan bagian dari kehidupan berkebangsaan. Oleh karena itu arsip yang tersimpan di lembaga kearsipan baik pusat atau daerah dan lembaga-lembaga/instansi-instansi pemerintahan harus dikelola dengan baik melalui pemeliharaan dan perawatan yang tepat sehingga keberadaan arsip dapat dipertahankan selamanya mengikuti daur hidup arsip.

Pembangunan Perpustakaan Grahatama memiliki hasil (*outcome*) yaitu manfaat bagi publik dengan bertambahnya khasanah arsip dari yang sudah ada. Peningkatan jumlah khasanah arsip yang berada di Perpustakaan Grahatama pada tahun 2010 adalah sebanyak 20.779 arsip sedangkan setelah selesai pembangunan perpustakaan Grahatama terjadi peningkatan jumlah arsip pada tahun 2016 sebanyak 32.635 arsip dan tahun 2017 sebanyak 35.751 arsip sehingga pembangunan konstruksi tersebut memiliki dampak positif bagi peningkatan referensi kearsipan.

Gambar 1.1 Penambahan Jumlah Arsip di Perpustakaan Grahatama Tahun 2010-2017

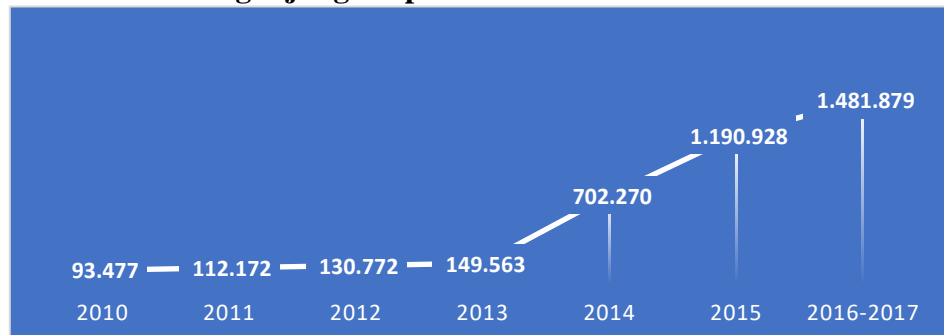


Sumber: Olah Data LAKIP BPAD Tahun 2017

Selanjutnya, pembangunan Grahatama pustaka memiliki hasil (*outcome*) yaitu manfaat bagi publik dengan bertambahnya pemanfaatan jumlah arsip sebagai sumber informasi. Peningkatan jumlah pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi yang berada di Perpustakaan Grahatama pada tahun 2010 adalah sebanyak 623 arsip sedangkan setelah selesai pembangunan perpustakaan Grahatama terjadi peningkatan jumlah arsip pada tahun 2016 sebanyak 5.205 arsip dan tahun 2017 sebanyak 6.233 arsip sehingga pembangunan konstruksi tersebut memiliki dampak positif bagi sumber informasi publik.

Pembangunan perpustakaan Grahatama juga memiliki hasil (*outcome*) yaitu meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan. Jumlah pengunjung perpustakaan Grahatama mengalami peningkatan setelah proyek pembangunan selesai, jumlah pengunjung di Perpustakaan Grahatama pada tahun 2010 adalah sebanyak 93.447 orang sedangkan setelah selesai pembangunan perpustakaan Grahatama terjadi peningkatan jumlah pengunjung pada tahun 2016 sampai tahun 2017 sebanyak arsip sehingga pembangunan konstruksi tersebut memiliki dampak positif 1.481.879 orang seperti tertera pada gambar berikut:

Gambar 1.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Grahatama Tahun 2010-2017



Sumber: Olah Data LAKIP BPAD Tahun 2017

Dampak negatif dari pembangunan perpustakaan Grahatama adalah berkurangnya ruang hijau sehingga menimbulkan polusi udara karena pada saat sebelum dibangunnya perpustakaan Grahatama, ruang hijau sangat terbentang luas di area pembangunan konstruksi dan pada saat pembebasan lahan, pihak pengembang harus membebaskan ruang hijau tersebut.

Berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di sekitar konstruksi Perpustakaan Grahatama peneliti melakukan wawancara dengan pelaku pengusaha UMKM makanan

ada kenaikan hasil UMKM masyarakat terutama UMKM makanan dan minuman di sekitar perpustakaan. Hal ini juga diperkuat dengan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bantul tahun 2010 dan 2015 dalam rangka menilai laju pertumbuhan UMKM sebelum dan sesudah pembangunan konstruksi Perpustakaan Grahatama bahwa sebelum pembangunan perpustakaan Grahatama memiliki nilai UMKM sebesar Rp. 1.169.988 sedangkan setelah pembangunan Perpustakaan Grahatama nilai UMKM bertambah menjadi Rp. 1.943.455 pada tahun 2015. Hal ini berarti bahwa pembangunan konstruksi Perpustakaan Grahatama memiliki dampak positif bagi laju pertumbuhan nilai UMKM sebesar Rp. 773.464 (1.6%) dalam jangka waktu 5 tahun.

Grahatama Pustaka merupakan perpustakaan umum yang dikelola oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Lasa (2009) perpustakaan umum adalah perpustakaan yang disediakan oleh pemerintah daerah guna menunjang sarana pembelajaran bagi masyarakat luas tanpa mengenal suku, ras, agama dan bangsa. Pengertian ini sejalan dengan prinsip keadilan di mana keadilan merupakan sesuatu yang memang harus diterapkan dalam seluruh lapisan kehidupan. Pembangunan Perpustakaan Grahatama memiliki hasil (*outcome*) yaitu dapat mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan berbudaya, dimana perpustakaan menyajikan berbagai informasi yang diperlukan oleh publik dengan berbasis teknologi informasi serta pendokumentasian berupa arsip yang diselenggarakan di berbagai lokasi sehingga masyarakat atau pengunjung perpustakaan dapat mencari, memilih serta memanfaatkan semua prasarana tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Analisis Efisiensi Biaya Pekerjaan Konstruksi

Rencana anggaran biaya merupakan bagian yang paling penting dalam melakukan pembangunan konstruksi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan perkiraan biaya pelaksanaan konstruksi dengan sumber daya dan metode yang digunakan dalam pembangunan konstruksi (Kurniawan: 2008).

Selain itu, dalam membuat perencanaan biaya juga harus memiliki perhitungan yang matang agar terjadi efisiensi dan efektifitas biaya. Kurniawan (2008) juga menyebutkan bahwa efisiensi pada intinya adalah perbandingan terbalik atau rasionalitas antara hasil yang diperoleh atau output dengan kegiatan yang dilakukan serta sumber-sumber dan waktu yang dipergunakan atau input. Sedangkan efektifitas diukur dari jumlah hasil keluaran (*output*) yang sesuai harapan/layak (*output layak*) dari seluruh hasil keluaran (*output*).

1. Pekerjaan Konstruksi *Fly Over* Jombor

Peneliti dalam menganalisis efisiensi biaya pekerjaan konstruksi *fly over* Jombor menggunakan data rekapitulasi pekerjaan konstruksi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku pelaksana pembangunan terkait dengan biaya persiapan atau biaya modal; operasional yang meliputi biaya pembangunan drainase, pengerasan jalan, struktur serta pekerjaan harian; dan biaya pembaruan berupa biaya peresmian bangunan.

biaya target awal yang meliputi biaya Investasi atau Modal (biaya target pekerjaan konstruksi) atau biaya persiapan serta biaya operasional dan biaya pembaruan sebesar Rp.118.423.234.000 memiliki keselarasan dengan biaya pelaksanaan atau operasional pembangunan konstruksi sebesar Rp.118.423.234.000. Hal ini berarti bahwa biaya awal target dapat digunakan secara efisien oleh PT Adhi Karya dalam melaksanakan pembangunan *fly over* Jombor yang merupakan kontraktor pembangunan oleh Dinas PUP-ESDM sebagai perusahaan pengembang pemenang tender.

Pembangunan konstruksi *fly over* Jombor dalam pelaksanaannya juga telah memenuhi target waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Dinas PU-ESDM dalam

mentargetkan pembangunan konstruksi *fly over* oleh PT Adhi Karya yang dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2010 dan mencapai penyelesaiannya pada bulan Desember tahun 2014.

2. Pekerjaan Konstruksi Titik 0 Km

Analisis mengenai efisiensi biaya pekerjaan konstruksi titik 0 km dalam penelitian ini menggunakan data rekapitulasi pekerjaan konstruksi dari bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM terkait dengan beberapa biaya utama dalam pembangunan konstruksi titik 0 km yang meliputi biaya persiapan atau biaya modal; operasional yang meliputi biaya pembangunan drainase, pengerasan jalan, struktur serta pekerjaan harian; dan biaya pembaruan berupa biaya peresmian konstruksi.

Keseluruhan biaya yang digunakan dalam pembangunan konstruksi titik 0 km berasal dari Dana Keistimewaan DIY yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM yang selanjutnya dikelola oleh bidang Bina Marga selaku pelaksana proyek dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM yang bertanggung jawab dalam pengerjaan pembuatan dan pemeliharaan jalan serta jembatan di provinsi yang selanjutnya pelaksanaan pembangunan dilaksanakan oleh PT. Soyuren sebagai perusahaan pemenang tender.

Biaya target awal yang meliputi biaya Investasi atau Modal (biaya target pekerjaan konstruksi) atau biaya persiapan serta biaya operasional dan biaya pembaruan sebesar Rp. 13,973,633,403. Sedangkan biaya total realisasi pengerjaan konstruksi diketahui sebesar Rp. 4,909,797,543 sehingga bidang Bina Marga memiliki sisa biaya operasional sebesar Rp. 9,063,835,860.

Selanjutnya oleh pihak bidang Bina Marga biaya tersebut dikoordinasikan kembali pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM sebagai laporan pembiayaan efisiensi. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM melakukan koordinasi kepada pemerintah provinsi terkait dengan anggaran biaya sisa dari pengerjaan konstruksi titik 0 km yang berasal dari Dana Keistimewaan DIY. Hal ini berarti bahwa biaya awal target dapat digunakan secara efisien oleh PT Soyuren dalam melaksanakan pembangunan titik 0 km dengan ketentuan pembiayaan operasional di bawah target awal.

Pembangunan konstruksi titik 0 km dalam pelaksanaannya juga terealisasi lebih awal dari target waktu pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Dinas PU-ESDM dalam mentargetkan pembangunan konstruksi titik 0 km oleh PT Soyuren yang dilaksanakan pada bulan September 2015 hingga Februari Januari 2016 namun dapat terealisasi pada penyelesaiannya pada bulan Desember 2015.

3. Konstruksi Grahata Pustaka

Analisis efisiensi biaya pada pekerjaan konstruksi Grahata Pustaka di Kabupaten Bantul Yogyakarta menggunakan data berupa biaya perencanaan dan realisasi yang meliputi biaya modal, operasional, pembaruan dan PPN pada tahun 2011 hingga 2015 dimana semua biaya tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DIY yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DIY kepada Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah (BPAD) Yogyakarta untuk merealisasikan pembangunan perpustakaan Grahata sebesar Rp.56.522.730.161.

Salah satu perusahaan pengembang yang dipercaya melaksanakan pembangunan konstruksi adalah PT. Ampuh Sejahtera dimana perusahaan tersebut diketahui telah membangun konstruksi perpustakaan Grahata pada tahun 2011 namun mengalami kemacetan di akhir tahun 2012 dikarenakan pengelolaan Sumber Daya Manusia pada

proyek tersebut yang kurang mampu mengalokasikan dana dalam pelaksanaan pembangunan perpustakaan Grahatama.

Berdasarkan pengamatan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Yogyakarta pada BPAD melalui proyek yang dikerjakan oleh PT. Ampuh Sejahtera, diketahui bahwa PT. Ampuh Sejahtera telah melakukan penggelapan sejumlah anggaran konstruksi dari BPAD sebesar 2,3 milyar selama pengerjaan proyek tersebut. Hal ini menimbulkan kerugian finansial bagi BPAD dan kemudian masalah tersebut berlanjut pada meja hijau yaitu di Pengadilan Negeri Bantul dalam perkara perdata yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi DIY karena kasus tersebut dipandang telah merugikan APBD DIY dan pemerintah provinsi diketahui juga telah mengeluarkan biaya untuk persidangan.

Selanjutnya BPAD juga mengalami kerugian waktu pelaksanaan pembangunan perpustakaan Grahatama yaitu pembangunan perpustakaan Grahatama mengalami pemberhentian sementara pada awal tahun 2013 hingga pertengahan tahun 2013 yang dikarenakan pihak BPAD menggunakan waktu tersebut untuk menaikkan kasus penggelapan anggaran oleh PT. Ampuh Sejahtera ke meja hijau.

Biaya yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi DIY pada awal proyek pengerjaan perpustakaan Grahatama oleh PT. Ampuh Sejahtera namun belum terealisasi sepenuhnya yaitu pada biaya operasional yang meliputi biaya pekerjaan tanah dan pasir, pekerjaan pasangan dan plesteran, struktur atau beton serta pekerjaan harian, dimana biaya tersebut diketahui merupakan biaya penggelapan oleh PT. Ampuh Sejahtera sebesar 2,3 milyar yang meliputi biaya pekerjaan tanah dan pasir sebesar Rp. 113.451.464, pasangan dan plesteran sebesar Rp. 1.982.257.773 serta biaya struktur dan beton sebesar Rp. 300.000.000 yang digelapkan dari biaya awal untuk struktur dan beton sebesar Rp. 25.381.949.009.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag bidang TI bahwa pembangunan konstruksi Grahatama mengalami kemunduran waktu pelaksanaan sebagaimana yang ditentukan pada awal pelaksanaan yaitu proyek konstruksi Perpustakaan Grahatama dimulai pada tahun 2011 hingga tahun 2012 namun karena kasus penggelapan yang dilakukan oleh PT. Ampuh Sejahtera berdampak pada kelangsungan pembangunan yaitu proyek konstruksi Perpustakaan Grahatama berhenti sementara pada akhir tahun 2012, kemudian BPK memutuskan untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk menaikkan kasus tersebut ke meja hijau di Pengadilan Negeri Bantul dan proyek pembangunan konstruksi Grahatama mengalami pemberhentian sementara.

Di satu sisi, terdapat pengurangan dana dari APBD sebesar 2,3 Miliar dari hasil penggelapan oleh PT Ampuh Sejahtera. Hal ini berarti bahwa efisiensi biaya pembangunan konstruksi Grahatama belum terselenggara dengan baik terkait dengan ketidaksinergisan antara biaya awal pengerjaan proyek dengan biaya operasional serta ketidaktepatan waktu pengerjaan dari awal taget.

Pada awal tahun 2013 hingga pertengahan tahun 2013 Pemerintah Provinsi melalui BPAD menyatakan untuk memberhentikan sementara pengerjaan konstruksi Grahatama karena pada rentang waktu tersebut akan digunakan oleh Pemerintah Provinsi dalam mengkasuskan PT Ampuh Sejahtera di Pengadilan negeri Bantul. Selanjutnya Pemerintah Provinsi menyatakan untuk memulai kembali pengerjaan konstruksi perpustakaan grahatama pada pertengahan tahun 2013 hingga akhir tahun 2015 dengan perusahaan pengembang yang baru serta pengaturan anggaran ulang yang mana biaya pembangunan diperoleh dari APBD 2013 hingga 2015.

Pada pertengahan tahun 2013 BPAD diketahui memulai melanjutkan proyek pembangunan konstruksi perpustakaan Grahatama dengan biaya persiapan (modal), Operasional, pembaruan dan PPN pada program pembukuan yang baru. Pemerintah Provinsi mengajukan anggaran pembaruan pembangunan konstruksi grahatama tahap 2

pada APBD sebesar Rp.93.609.750.000 dengan rincian biaya Persiapan (Modal) sebesar Rp. 37.500.000, biaya operasional sebesar Rp.89.953.175.000 serta biaya pembaruan berupa peresmian konstruksi sebesar Rp. 500.000.000.

Berdasarkan anggaran awal yang diajukan pada APBD untuk pembangunan konstruksi Grahatama adalah sebesar Rp.56.522.730.161 namun pada realisasi anggaran total hingga selesainya proyek konstruksi perpustakaan tersebut diketahui sebesar Rp. 93.609.750.000 sehingga pemerintah provinsi mengalami kerugian sebesar Rp. 37.087.019.839. Hal ini berarti bahwa pekerjaan proyek konstruksi perpustakaan Grahatama mengalami pembengkakan anggaran dari anggaran awal yang telah ditentukan sehingga pemerintah provinsi melalui BPAD belum menyelenggarakan efisiensi biaya secara akuntabel dengan adanya pembengkakan biaya konstruksi. Di satu sisi, pemerintah Provinsi melalui BPAD juga belum menerapkan efisiensi waktu dengan adanya kemunduran waktu pengerjaan konstruksi Perpustakaan Grahatama.

Kesimpulan

Nilai publik dari *Flyover Jombor*, Titik 0 Km dan Perpustakaan Grahatama yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dijabarkan dalam tiga aspek, seperti manfaat bagi publik, keadilan dan kesejahteraan. Ketiga aspek ini merupakan indikator penting untuk menentukan apakah infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah berfungsi dengan baik dan bermanfaat bagi publik. *Outcome* dikatakan berhasil ketika memenuhi ketiga elemen nilai publik tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, ketiga konstruksi telah memenuhi ketiga aspek nilai publik.

Selanjutnya, terkait dengan efisiensi biaya pembangunan konstruksi oleh pemerintah DIY, tidak semuanya memiliki aspek efisiensi biaya, seperti dalam pembangunan perpustakaan Grahatama bahwa biaya konstruksi melebihi biaya anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan dan ketepatan waktu pembangunan konstruksi tertunda selama 3 tahun.

REFERENSI

- Aldridge, R., & Stoker, G. (2002). *Advancing a new public service ethos*. London: New Local Government Network.
- Ambe, Intaher M and Johanna A Badenhorst-Weiss (2016). "Chapter 16 A review of Procurement Practices In The South African Public sector"
- Arikunto, S. (2010). *Research Procedure A Practical Approach*. Jakarta: PT Rineka Reserved.
- Arrowsmith, J. (2011). Trial watch: phase III and submission failures: 2007–2010. *Nature reviews Drug discovery*, 10(2), 87-87
- Arusman. 2012. Mengukur Kepuasan Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik. *Artikel kepuasan masyarakat dan kualitas pelayanan publik*
- Aryansyah, Novan Dwi dan Retno Indryani. 2012. Analisa Manfaat Dan Biaya Rusunawa Jemundo, Sidoarjo. *Jurnal Teknik Pomits*. 1(1), 1-5
- Avita, Y. D. Y. N. (2015). Analisis Kondisi Sanitasi Industri Rumah Tangga (IRT) Tape Singkong di Kabupaten Bondowoso.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46-62
- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN
- Barang, L. K. P. (2010). Modul 1 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Di Indoensia: Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar/Pertama. *Jakarta: LKPP*.
- Basuki, I., & Siswadi, S. (2009). Biaya Kemacetan Ruas Jalan Kota Yogyakarta. *Jurnal Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 9(1), pp-71.

- Blocher, Edward J. 2007. *Manajemen Biaya*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Christian, L., Rosalina, R., Melissa, M., & Rosalia, R. (2013). Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi Sistem Informasi Operasional menggunakan Metode Cost Benefit Analysis: Studi Kasus pada Restaurant Sea Food di Jakarta. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 4(2), 1340-1351
- Dewi, R. E. (2012). *Sembilan Megaproyek di DIY Mangkrak*. Yogyakarta: <http://jogja.tribunnews.com/2012/09/26/sembilan-megaproyek-di-diy-mangkrak>
- Dewi, Y. N., & Nugroho, A. S. B. (2014). Analisis Biaya-Manfaat Pada Proyek Peningkatan Ruas Jalan Provinsi Studi Kasus: Ruas Jalan Wonosari-Semin Kabupaten Gunungkidul (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2003). The New Public Service: an approach to reform. *International Review of Public Administration*, 8(1), 3-10.
- Fernando, F., & Chandra, C. (2011). Analisis Biaya Dan Manfaat Penggunaan Sistem Pengolahan Transaksi Pada Pt. Jaya Beton Perkasa Palembang
- Friatno, A. H., Sadarun, B., & Nurdiana, A. (2014). Analisis Biaya Dan Manfaat Usaha Wisata Terumbu Karang Taman Pendidikan Laut Bintang Samudera. *Jurnal Bisnis Perikanan (Journal of Fishery Business)*, 1(1).
- Handoko, T. H. (2015). *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Hartiningsih. (2016). *Konstruksi Bangunan Untuk Desain Interior*. Yogyakarta: Institut Seni Indonesia Yogyakarta
- Hayati, F. M., Wicaksono, A., & Sutikno, F. R. (2014). Biaya Kemacetan Dan Polusi Karbon Monoksida Pada Lalu Lintas Akibat Adanya Pembangunan Fly-Over (Studi Kasus: Fly-Over Simpang Jalan Ahmad Yani-Gatot Subroto Kota Banjarmasin). *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, 5(2), 87-96.
- Hukom, A., & Alexandra Hukom, S. E. (2016). *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, Kinerja Pembangunan Ekonomi dan Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah* (Doctoral dissertation, Universitas Udayana)
- Istari, A. C. D. (2013). Analisis Biaya Manfaat Proyek Pembangunan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Terhadap Peningkatan Pengembangan Ekonomi Lokal (Proyek Kasus Ds. Sidomulyo, Kec. Purwoasri, Kediri). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(2).
- Kholid, A. (2015). *Analisis Partisipasi Politik Pengguna Media Sosial Facebook dan Twitter di Indonesia Selama Masa Pemilihan Presiden 2014* (Doctoral dissertation, Tesis Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Kurniawan, H. (2008). Optimasi Interval Waktu Perawatan Pencegahan Dengan Penggantian Pada Komponen Kritis Lokomotif CC 203 Berbasis Reliability Dengan Metode Reliability-Centered Maintenance (RCM) Dan Model Minimasi Biaya
- Lasa, H. S. (2009). *Kamus Kepustakawanan Indonesia*. Pustaka Book Publisher
- Lewis, T. M., & Atherley, B. A. (1996). Analysis of construction delays. In *Proceedings of the International Symposium for the Organization and Management of Construction: Shaping Theory and Practices* (Vol. 2, pp. 60-71).
- Lufityanti, Gaya. (2017). *Banyaknya Sampah Bikin Titik Nol Kilometer Tidak Enak Dipandang*. Yogyakarta: <http://jogja.tribunnews.com/2017/09/08/banyaknya-sampah-bikin-titik-nol-kilometer-tidak-enak-dipandang>
- Marga, D. J. B. (1997). Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI). *Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum*.
- Margareth, M., Franklin, P., & Warouw, F. (2015). Studi Kemacetan Lalu Lintas Di Pusat Kota Ratahan. *SPASIAL*, 2(2), 89-97

- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosda Karya
- Muhammad, J., Pambudi, A., & Subarkah, K. Analisis Dampak Sosial dan Ekonomidalam Pembangunan Flyover Jombor di Kabupaten Sleman. *Pelita-Jurnal Penelitian Mahasiswa UNY*, (1).
- Nugroho,Joko. 2013. Fly Over Jombor Mulai Beroperasi. Yogyakarta: <http://www.harianjogja.com/baca/2013/07/28/mudik-lebaran-2013-fly-over-jombor-mulai-beroperasi-431871>
- O'Flynn, J. (2007). From new public management to public value: Paradigmatic change and managerial implications. *Australian journal of public administration*, 66(3), 353-366
- Prabantoro, G. (2004). Mengukur Kelayakan Ekonomis Proyek Sistem Informasi Manajemen Menggunakan Metode 'Cost & Benefits Analysis' Dan Aplikasinya Dengan MS EXCEL 2000. *Makalah. STIE Indonesia*.
- Pramesti, O. L. (2011). *Cegah Kemacetan, Jalan Layang Jombor Dibangun*. Yogyakarta: <http://nationalgeographic.co.id/berita/2011/08/ceguh-kemacetan-jalan-layang-jombor-dibangun>
- Prasetya, F. (2012). Modul Ekonomi Publik Bagian VI: Analisis Biaya dan Manfaat.
- Purwaningsih, M. R. (2012). Analisis Biaya Manfaat Sosial Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Gedebage Bagi Masyarakat Sekitar. *Journal of Regional and City Planning*, 23(3), 225-240.
- Rama, A. and Makhilani, M., 2014. Analisis kesesuaian konstitusi ekonomi indonesia terhadap ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 6(1), pp.23-52.
- RI, M. K. (2002). Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1407/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman pengendalian dampak pencemran udara-[PERATURAN].
- Salim, A., & Carolina, S. (2006). *Teori dan paradigma penelitian sosial: dari Denzin Guba dan penerapannya*. Tiara Wacana Yogya
- Setiawan, T. H., & Ariadi, T. (2012). Indikator Keberhasilan Proyek Pembangunan Bangunan Gedung Yang Dipengaruhi Faktor Internal Site Manager. *Jurnal Teknik Sipil*, 11(2)
- Sheila, Ema. 2013. *Public Value (Theory and Practice)*.
- Singarimbun, Masri, and Sofian Effendi. "Metode Penelitian Research Sosial." (2000)
- Stoker, G. (2006). Public value management: A new narrative for networked governance?. *The American review of public administration*, 36(1), 41-57.
- Sugiyono, M. P. P. (2009). Pendekatan Kualitatif. *Kuantitatif dan R&D*, Jakarta: Alfabeta
- Tjusanto, F. (2013). *Studi Mengenai Dampak Penerapan Manajemen Keunggulan Proyek Terhadap Kesuksesan Proyek Konstruksi* (Doctoral Dissertation, UAJY)
- Todoruț, A. V., & Tselentis, V. (2015). Designing the model of public value management
- Tourism, D. o. (2006). *Integrated Enviromental Management Information Series (Socio-Ekonomi Impact Assesment)*. South Africa: Berne Conventio.
- Yang, Kaifeng. 2016. Creating Public Value and Institutional Innovations across Boundaries; An Integrative Process of Participation, Legitimation, and Implementation. *Public Administration*. Nov/Dec. 76(6) APSPA
- Yogya , Koran. 2015. *Perpustakaan Terbesar Se Asia Tenggara Telah Dibuka*. Yogyakarta. <https://koranyogya.com/perpustakaan-terbesar-se-asia-tenggara-telah-dibuka/>
- Yudha, F. M. (2013). *Analisis Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Pengendalian Waktu Pada Proyek Konstruksi* (Doctoral dissertation, UAJY).

Peraturan:

- Peraturan Daerah DIY No. 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Konstruksi
- Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Nomor. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Website:

<https://jogjaprov.go.id/>

<https://lpse.jogjaprov.go.id/eproc4/>

<http://bpad.jogjaprov.go.id/>

<https://jogjakota.bps.go.id/>

<http://dishub.jogjaprov.go.id/>

<https://bantulkab.bps.go.id/>

Dokumen:

Badan Pusat Statistik (Jogja dalam Angka) Tahun 2016

Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPAD tentang Proyek Perpustakaan Tahun 2011-2015

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPK tentang Proyek Fly over Jombor Tahun 2015

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas PUP-ESDM DIY tentang Proyek Titik 0 Km tahun 2016

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas PUP-ESDM DIY 2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas PUP-ESDM DIY 2016

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPAD DIY 2015

Laporan Akhir, Garis Besar Strategi Manajemen Limbah Cair di Kota Yogyakarta dan sekitarnya, tahun 2016, USAID

Laporan Lalu Lintas Dinas Perhubungan DIY Tahun 2016